



Efektivitas Tata Naskah Dinas Elektronik dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian Tata Usaha Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Rafli Hisyam Maulana¹, Vidya Imanuari Pertiwi²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Received: 02 Juli 2026
Revised: 10 Juli 2026
Accepted: 13 Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan tata naskah dinas elektronik dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penilaian efektivitas dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas program Budiani yang mencakup indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, serta pemantauan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata naskah dinas elektronik berperan dalam meningkatkan keteraturan administrasi dan efisiensi pengelolaan dokumen. Namun demikian, tingkat efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala, antara lain belum meratanya pemanfaatan sistem oleh seluruh pejabat terkait, perbedaan tingkat pemahaman pengguna, serta belum terlaksananya pemantauan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan dalam pelaksanaannya agar tata naskah dinas elektronik dapat berfungsi secara lebih efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Tata Naskah Dinas Elektronik, Administrasi

(*) Corresponding Author: 23041010116@student.upnjatim.ac.id
vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

How to Cite: Maulana, R., & Pertiwi, V. (2026). Efektivitas Tata Naskah Dinas Elektronik dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian Tata Usaha Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.C), 168-177. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13597>.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan administrasi. Penggunaan teknologi berbasis digital menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja, terutama dalam proses pengelolaan informasi dan dokumen (Martono et al., 2021). Dalam konteks organisasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai sarana untuk mendukung proses kerja yang lebih sistematis, terintegrasi, dan mudah diakses. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam aktivitas administrasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, publikasi layanan didefinisikan sebagai aktivitas atau serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administratif yang diselenggarakan oleh negara. Pelayanan publik dapat dianggap

efektif apabila penerima layanan merasakan kemudahan dalam mengaksesnya, didukung oleh prosedur yang sederhana, respons yang cepat dan tepat waktu, serta hasil yang memuaskan. Setiap aparatur pemerintah selaku penyelenggara layanan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan efektif guna memastikan kepuasan masyarakat yang menerima layanan tersebut. (Sari & Pertiwi, 2025)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong instansi pemerintah untuk melakukan transformasi dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran. Di wilayah Jawa Timur, inisiatif yang sama telah dimulai dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang mendorong penerapan teknologi di dalam administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berfungsi sebagai dasar regulatif bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pemanfaatan teknologi ke dalam pelaksanaan tugas dan proses kerja pemerintahan. (Sari & Pertiwi, 2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Magesty et al., 2024). Dalam konteks administrasi pemerintahan, tata naskah dinas merupakan elemen penting karena berkaitan langsung dengan proses komunikasi formal, pengambilan keputusan, serta tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Seiring dengan penerapan SPBE, pengelolaan tata naskah dinas mengalami pergeseran dari sistem manual menuju sistem elektronik. Tata naskah dinas elektronik memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, pendistribusian, dan pengarsipan naskah dilakukan secara digital sehingga dapat mempercepat alur kerja dan meminimalkan kesalahan administrasi (Dinda Amirah Amirudin, 2022). Namun, efektivitas penerapan tata naskah dinas elektronik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, melainkan juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. (Afif et al., 2025)

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah telah mengadopsi tata naskah dinas elektronik guna menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran. Bagian Tata Usaha memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tata naskah dinas karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, serta koordinasi administrasi internal (Suci et al., 2024). Penerapan tata naskah dinas elektronik di sub bagian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung kelancaran pelayanan administrasi.

Berbeda dengan instansi pemerintah daerah lainnya, penerapan tata naskah dinas elektronik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan langsung dengan pengelolaan administrasi di sektor pelayanan kesehatan. Sebagai perangkat daerah yang bergerak di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menangani berbagai dokumen strategis yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan, koordinasi lintas sektor, serta administrasi pelayanan kesehatan Masyarakat (Fitri et al., 2024). Tingginya volume surat masuk dan surat keluar, kebutuhan ketepatan waktu dalam distribusi informasi, serta tuntutan akurasi dokumen menjadikan tata naskah dinas elektronik sebagai

instrumen penting dalam menjaga kelancaran administrasi. Kondisi ini membedakan penerapan tata naskah dinas elektronik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan instansi lain yang memiliki karakter beban administrasi dan jenis dokumen yang berbeda.

Meskipun tata naskah dinas elektronik telah diterapkan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti adaptasi pegawai terhadap sistem baru, kendala teknis, serta penyesuaian alur kerja dengan prosedur elektronik yang berlaku. Kondisi tersebut menjadikan evaluasi terhadap efektivitas penerapan tata naskah dinas elektronik penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana sistem yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi organisasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik pelaksanaan tata naskah dinas elektronik, mengungkap berbagai kendala yang muncul, serta menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi dalam pengembangan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik pada instansi pemerintah.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan tata naskah dinas elektronik dalam mendukung penyelenggaraan administrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penelitian dilaksanakan di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan dilakukan selama penulis menjalani kegiatan magang.

Analisis efektivitas dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani (2007) yang meliputi empat indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penerapan tata naskah dinas elektronik. (Sari & Pertiwi, 2025)

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi serta wawancara mendalam terhadap dua informan yang merupakan pegawai dan terlibat langsung dalam pengelolaan tata naskah dinas elektronik. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen administrasi dan berbagai referensi tertulis yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara, kemudian dianalisis untuk menilai tingkat efektivitas tata naskah dinas elektronik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas administrasi perkantoran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tata naskah dinas elektronik digunakan sebagai sarana pengelolaan surat dan dokumen kedinasan secara digital, mulai dari penerimaan, pendistribusian, hingga pengarsipan naskah dinas (Susanti, Arief Fadholi, 2024). Penerapan sistem ini

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, ketertiban administrasi, serta akurasi pengelolaan dokumen di lingkungan instansi pemerintah.

Bagian Tata Usaha memiliki peran penting dalam pelaksanaan tata naskah dinas elektronik karena unit kerja ini bertanggung jawab terhadap administrasi persuratan dan pengelolaan dokumen internal. Melalui penerapan sistem elektronik, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dialihkan ke sistem digital guna menyesuaikan dengan tuntutan modernisasi birokrasi (Suci et al., 2024). Penerapan tata naskah dinas elektronik diharapkan mampu mendukung kelancaran komunikasi internal dan mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha dilakukan melalui pemanfaatan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dengan alur kerja administrasi perkantoran. Setiap naskah dinas yang masuk terlebih dahulu diterima dan dicatat oleh petugas administrasi, kemudian diproses melalui sistem untuk selanjutnya didistribusikan kepada unit atau pejabat yang berwenang (Pakpahan & Utami, 2025). Proses disposisi dilakukan secara elektronik sehingga dapat dipantau secara langsung oleh pihak terkait.

Dalam pelaksanaannya, sistem ini melibatkan beberapa pihak, seperti petugas administrasi, admin sistem, serta pejabat struktural yang menerima dan menindaklanjuti naskah dinas. Penggunaan tata naskah dinas elektronik didukung oleh sarana dan prasarana berupa perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem aplikasi yang digunakan secara internal (Ary Yudha Febrian, 2025). Tingkat efektivitas tata naskah dinas elektronik sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan menggunakan sistem, serta konsistensi dalam menerapkan prosedur kerja yang telah ditentukan.

Penerapan tata naskah dinas elektronik memberikan berbagai manfaat bagi Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah meningkatnya efisiensi dalam pengelolaan surat dan dokumen kedinasan. Proses pencatatan, pendistribusian, dan penelusuran naskah dinas dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual, sehingga mempercepat penyelesaian administrasi dan mengurangi waktu tunggu dalam proses pelayanan internal. (Juliana et al., 2025)

Selain meningkatkan efisiensi, tata naskah dinas elektronik juga berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban administrasi. Seluruh dokumen tersimpan secara sistematis dalam sistem elektronik sehingga mudah ditelusuri kembali ketika dibutuhkan (Dewanti Dwi Maharani & Lawanda, 2023). Kondisi ini meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan mempermudah proses pengelolaan arsip. Dari sisi pengarsipan, penggunaan sistem elektronik juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik yang memerlukan ruang penyimpanan besar, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih praktis dan efektif. (FERNANDA, 2024)

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penerapan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan sistem berbasis elektronik. Beberapa pegawai masih terbiasa menggunakan metode manual dalam menerima dan menindaklanjuti naskah dinas, sehingga pemanfaatan sistem elektronik belum sepenuhnya optimal.

Selain kendala sumber daya manusia, kendala teknis seperti gangguan jaringan internet juga memengaruhi kelancaran penggunaan tata naskah dinas elektronik. Ketika terjadi gangguan koneksi, proses pencatatan dan pendistribusian naskah dinas menjadi terhambat. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap penggunaan sistem juga turut memengaruhi tingkat efektivitas tata naskah dinas elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diterapkan, masih diperlukan upaya perbaikan agar pemanfaatannya dapat berjalan secara maksimal.

Untuk mengukur efektivitas penerapan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, penelitian ini mengacu pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007). Teori tersebut mencakup empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Keempat indikator tersebut dijadikan landasan analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tata naskah dinas elektronik telah berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Ketepatan Sasaran Program

Menurut Budiani (2007), ketepatan sasaran program menunjukkan sejauh mana pelaksanaan suatu program sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dikatakan efektif apabila sasaran yang dituju tidak hanya ditetapkan secara administratif, tetapi juga benar-benar terlibat dan memanfaatkan program sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dengan demikian, indikator ketepatan sasaran tidak hanya menilai siapa yang menjadi target program, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut digunakan oleh sasaran yang tepat.

Dalam praktik penggunaan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sasaran utama program ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi persuratan, termasuk petugas administrasi serta pejabat struktural yang memiliki kewenangan dalam memberikan disposisi dan tindak lanjut naskah dinas. Penetapan sasaran tersebut telah sesuai dengan tujuan program, yaitu menciptakan pengelolaan surat yang lebih tertib, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan sistem elektronik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan magang, penerapan tata naskah dinas elektronik telah digunakan secara aktif oleh petugas administrasi yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pendistribusian surat. Salah satu informan (Bapak Edi sebagai pemegang penuh TNDE) menyatakan bahwa dengan adanya sistem elektronik, pekerjaan yang beliau lakukan jadi lebih cepat. Semua surat tercatat rapi, dan ketika mencari arsip, tidak perlu lagi bolak-balik ke lemari penyimpanan. Sementara itu, informan ke-2 (Bapak Suparna sebagai pembantu Pak Edi dan pelaksana Tata Usaha Manual) menyebutkan sebenarnya beliau ingin menggunakan TNDE sepenuhnya, tapi terkadang masih ada surat yang beliau disposisi secara manual, terutama kalau sedang sibuk atau mendesak.

Hal ini menunjukkan bahwa program telah menyasar kelompok kerja yang tepat dan relevan dengan kebutuhan operasional Bagian Tata Usaha. Keberadaan sistem elektronik membantu petugas administrasi dalam mengelola naskah dinas secara lebih terstruktur dibandingkan dengan metode manual.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan bahwa tidak seluruh sasaran program memanfaatkan sistem secara optimal. Beberapa pejabat struktural masih melakukan proses disposisi dan tindak lanjut surat melalui cara manual atau komunikasi informal. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan sistem belum merata di seluruh sasaran program, sehingga tujuan efisiensi dan percepatan alur persuratan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan analisis tersebut, jika ditinjau menggunakan indikator ketepatan sasaran program menurut Budiani (2007), pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan cukup tepat sasaran, namun belum sepenuhnya efektif. Program telah ditujukan kepada kelompok yang sesuai, tetapi tingkat pemanfaatannya oleh seluruh sasaran masih perlu ditingkatkan agar efektivitas program dapat tercapai secara optimal.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi salah satu komponen krusial dalam mengukur efektivitas tata naskah dinas elektronik (TNDE), karena berkaitan erat dengan pemahaman serta kesiapan aparatur dalam mengoperasikan sistem tersebut. Budiani (2007) menjelaskan bahwa sosialisasi program mencerminkan kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat program kepada pihak sasaran, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Dalam pelaksanaan TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi dan arahan teknis kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan surat dan dokumen dinas. Sosialisasi mencakup penjelasan mengenai alur pengelolaan naskah dinas secara elektronik, penggunaan aplikasi persuratan, serta penyesuaian prosedur kerja dari sistem manual ke sistem digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan: Informan 1 (Bapak Edi) menyampaikan bahwa beliau mendapat pelatihan dan arahan tentang penggunaan sistem. Memang awalnya agak bingung, tetapi setelah sosialisasi, alur kerja dengan TNDE lebih jelas dan mudah diikuti. Dan Informan ke-2 (Bapak Suparna) menyebutkan kalau sosialisasinya bagus untuk staf administrasi, tapi melihat beberapa pegawai belum sepenuhnya paham cara kerja sistem. Kadang disposisi surat masih dilakukan manual karena belum terbiasa, dan itu saya lakukan untuk disposisi manual.

Hasil temuan menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan, tetapi sifatnya masih terbatas pada pegawai administrasi yang langsung mengelola persuratan. Pemahaman di kalangan pejabat struktural belum merata, sehingga pemanfaatan TNDE belum berjalan konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan surat.

Dari perspektif efektivitas program, kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi cukup berhasil, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan seluruh sasaran. Sosialisasi yang belum menyentuh seluruh unsur organisasi berdampak pada masih ditemukannya kebiasaan kerja lama dalam pengelolaan naskah dinas. Berdasarkan indikator sosialisasi program menurut Budiani (2007), pelaksanaan sosialisasi TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan cukup efektif, namun

perlu penguatan agar seluruh sasaran benar-benar terlibat dan menggunakan sistem secara optimal.

3. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan program menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas tata naskah dinas elektronik (TNDE), karena mencerminkan tingkat ketercapaian hasil pelaksanaan program terhadap sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Budiani (2007), efektivitas suatu program dapat dinilai melalui kesesuaian antara tujuan yang dirumuskan dengan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan efektif apabila implementasinya mampu mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Secara umum, tujuan utama penerapan TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi persuratan, mempercepat proses distribusi dan disposisi dokumen, serta mendukung keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Sistem berbasis elektronik diharapkan mampu meminimalkan penggunaan prosedur manual yang cenderung memakan waktu lebih lama serta berisiko menimbulkan kekeliruan administratif.

Berdasarkan hasil wawancara, informan 1 (Bapak Edi) menyebutkan kalau sejauh ini sistem membantu kami mencatat dan menyimpan surat dengan rapi. Arsip mudah dicari dan distribusi surat lebih terstruktur daripada sebelumnya. Dan informan ke-2 (Bapak Suparna) menambahkan kalau manfaatnya jelas terasa untuk administrasi, tetapi untuk percepatan disposisi masih belum maksimal. Kadang beliau tetap harus memberikan disposisi secara manual karena situasi mendesak atau sistem belum diakses saat itu.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan TNDE telah memberikan manfaat nyata, khususnya dalam pengelolaan arsip dan administrasi persuratan. Namun, pencapaian tujuan secara menyeluruh, terutama percepatan proses disposisi oleh pejabat terkait, masih menghadapi kendala. Penggunaan metode manual atau komunikasi informal masih terjadi, sehingga efektivitas sistem belum optimal dalam mendukung seluruh alur kerja.

Berdasarkan analisis tersebut, tujuan penerapan TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah tercapai sebagian, terutama dalam aspek penataan administrasi dan pengelolaan arsip. Namun, dalam aspek percepatan alur kerja dan optimalisasi penggunaan sistem oleh seluruh pejabat terkait, tujuan program masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, menurut indikator tujuan program dalam teori Budiani (2007), efektivitas TNDE dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keseluruhan tujuan administrasi persuratan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program menjadi salah satu indikator krusial dalam menilai efektivitas tata naskah dinas elektronik (TNDE), karena berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan serta memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan tujuan yang telah ditetapkan. Budiani (2007) menyatakan bahwa pemantauan program merupakan kegiatan evaluatif yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan perhatian terhadap proses

pelaksanaan serta perilaku pihak sasaran. Pemantauan yang dilakukan secara optimal memungkinkan penyelenggara untuk mengenali hambatan yang muncul, melakukan langkah perbaikan, serta mempertahankan konsistensi dalam pemanfaatan sistem elektronik. Dalam pelaksanaan TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengawasan internal, evaluasi penggunaan sistem oleh pegawai, dan pengawasan atasan langsung. Tujuannya adalah memastikan TNDE digunakan sesuai prosedur dan mendukung kelancaran administrasi perkantoran.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1 (Bapak Edi), beliau mengatakan bahwa pemantauan biasanya hanya dilakukan kalau ada kendala atau surat tertunda. Tidak ada evaluasi rutin, jadi kadang beliau bingung harus memperbaiki kesalahan yang kecil. Kemudian informan ke-2 (Bapak Suparna) menyebutkan kalau beliau merasakan sama. Pemantauan masih situasional. Kalau ada laporan keterlambatan, baru ditindaklanjuti. Idealnya, harus ada evaluasi rutin agar semua orang konsisten menggunakan TNDE.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pemantauan telah dilakukan, tetapi belum secara intensif dan berkelanjutan. Pengawasan lebih bersifat situasional dan belum ada mekanisme evaluasi berkala yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan variasi dalam penerapan TNDE, di mana sebagian proses administrasi berjalan sesuai sistem elektronik, sementara sebagian lain masih dilakukan secara manual atau melalui komunikasi informal. Minimnya pemantauan yang sistematis membuat kebiasaan kerja lama tetap bertahan dan menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem.

Berdasarkan analisis tersebut, pemantauan TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan belum optimal. Efektivitas program sangat bergantung pada evaluasi konsisten dan upaya lanjutan yang terstruktur. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan agar TNDE dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung administrasi persuratan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas tata naskah dinas elektronik (TNDE) di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ini telah berjalan dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan administrasi persuratan. TNDE membantu menciptakan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, memudahkan pencatatan dan penelusuran arsip, serta mendukung peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik.

Ditinjau dari indikator efektivitas program menurut Budiani, tingkat efektivitas TNDE dapat dikategorikan cukup, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek ketepatan sasaran, program telah menysasar unit kerja yang tepat, tetapi pemanfaatannya belum merata oleh seluruh pejabat terkait. Pada aspek sosialisasi, kegiatan penyampaian informasi dan arahan teknis telah dilaksanakan, tetapi pemahaman dan penerapannya belum merata di semua tingkatan pengguna. Selanjutnya, dari aspek tujuan program, sebagian tujuan telah tercapai, khususnya dalam penataan administrasi persuratan, namun percepatan alur kerja dan

optimalisasi disposisi elektronik masih menghadapi kendala. Pada aspek pemantauan program, pengawasan telah dilakukan, tetapi belum secara terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas TNDE di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada pemanfaatan sistem oleh seluruh pejabat, sosialisasi yang lebih merata, dan mekanisme pemantauan yang konsisten agar efektivitas program dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi guna meningkatkan efektivitas tata naskah dinas elektronik (TNDE) ke depan:

1. Penguatan komitmen pengguna sistem.

Perlu adanya penguatan komitmen dari seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan naskah dinas agar secara konsisten memanfaatkan sistem elektronik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dukungan pimpinan menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan pola kerja dari sistem manual ke sistem digital.

2. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait TNDE perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun metode pelaksanaannya. Sosialisasi tidak hanya difokuskan pada staf administrasi, tetapi juga perlu melibatkan pejabat struktural agar pemahaman dan pemanfaatan sistem dapat berjalan merata di seluruh tingkatan pengguna.

3. Pemantauan dan evaluasi berkala.

Pemantauan dan evaluasi secara terstruktur dan berkala terhadap pelaksanaan TNDE sangat diperlukan. Dengan adanya dokumentasi dan evaluasi rutin, kendala yang muncul dapat diidentifikasi lebih cepat, dan langkah perbaikan maupun pengembangan sistem dapat dilakukan secara tepat.

4. Kajian penelitian selanjutnya.

Penelitian berikutnya disarankan untuk menelaah efektivitas TNDE dengan pendekatan atau indikator yang berbeda, sehingga mampu memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian di bidang administrasi publik serta pengelolaan tata naskah dinas berbasis digital.

REFERENSI

- Afif, M., Harahap, S., Sihombing, T., Siahaan, A. Y. S., & Terbuka, U. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK (NADINE) DALAM PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN WAJIB PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*. 6(4), 2011–2029.
- Ary Yudha Febrian, W. P. H. (2025). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA NASKAH DINAS*. 4(5). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4028>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Dewanti Dwi Maharani, V., & Lawanda, I. I. (2023). *IMPLEMENTASI ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM UNTUK*

- MENDUKUNG E-GOVERNMENT: STUDI KASUS SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINDE) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI*. 2(1). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i1.1132>
- Dinda Amirah Amirudin, H. N. (2022). *Implementasi aplikasi naskah dinas elektronik*. 1–13.
- FERNANDA, M. (2024). *DAMPAK PENGGUNAAN ARSIP ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA KERJA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*.
- Fitri, A. A., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2024). *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance*. 6(3), 8412–8424.
- Juliana, A., Tawai, A., & Yusuf, M. (2025). *EFEKTIVITAS SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK DALAM LAYANAN PERSURATAN DI BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SULAWESI TENGGARA*. 2(1), 12–22.
- Magesty, A., Smart, M., Di, C., & Magelang, K. (2024). *OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI MAGESTY (MAGELANG SMART CITY) DI KOTA MAGELANG*. 1–15.
- Martono, H. Y., Elektronika, P., Surabaya, N., & Papas, D. P. (2021). *Aplikasi tata naskah dinas elektronik*. 1–7.
- Pakpahan, R. A., & Utami, D. A. (2025). *PENGELOLAAN ARSIP SURAT MASUK DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) Management Of Incoming Letter Archives At The East Java Provincial Energy And Mineral Resources Office Through The Electronic Official Manuscript System Application (TNDE)*. 3, 211–222.
- Sari, R., & Pertiwi, V. I. (2025). *Efektivitas Program Si Mas Baik (Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. 3, 788–799.
- Suci, D. A., Tohopi, R., Tantu, R., Publik, A., Gorontalo, U. N., Tata, P., Dinas, N., Dinas, T. N., & Elektronik, B. (2024). *PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT*. 2.
- Susanti, Arief Fadholi, H. (2024). *PENATAAN SISTEM ALUR TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DIREKTORAT RUMAH SUSUN KEMENTERIAN PUPR JAKARTA*. 9, 627–642.